



MIMBAR ULAMA

EDISI KHUSUS
Des/2021

SUARA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mujahid Digital



Literasi
Media
Multiplatform
Berwawasan
Islam Wasathiyah

- Influencer Islam Wasathiyah
- Kitab Maulid Ulama Betawi
- 9 Resolusi Jihad Ekonomi Hasil Kongres Ekonomi Umat II MUI

TAHAN DIRI COVID-19 BELUM PERGI



#MulaiDariKamu

**PAKAI MASKER
DAN CEPAT
VAKSIN.
LINDUNGI DIRI,
KENDALIKAN
PANDEMI.**



Lindungi Keluarga, Lindungi Indonesia



MIMBAR ULAMA

Pengelola
Majalah Mimbar Ulama

Pembina:
Masduki Baidlowi

Pengarah:
Asrori S Karni

Penanggung Jawab:
Mabroer MS

Pemimpin Redaksi:
Idy Muzayyad

Wakil Pemimpin Redaksi:
Muhammad Fakhruddin

Redaktur Senior:
Musthofa Hilmi
Asrori S Karni
Mabroer MS

Dewan Redaksi:
M Nashih Nasrullah, M Fakhruddin
Ja'far Shodiq, Mujahidin Nur
Angga Ulung Tranggana,
Azharun Niam, Hening Parlan
Imam Prihadiyoko

Sekretaris Redaksi:
Arif D Hasibuan

Bendahara Redaksi:
Iroh Siti Zahroh

Foto:
Junaidi

Tata Usaha dan Keuangan:
Akbar Kurniawan

Desain Cover dan Isi:
Tammy Farid

Alamat Redaksi:
Jl. Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat
10320. Telp. 021-31902666,
021-03917853
<http://www.mui.or.id>
Email: mimbarulama@gmail.com

IJTIMA ULAMA MUI BERIKAN SOLUSI BAGI ANAK BANGSA

hal. 10



Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Sebagai Duta Islam Wasathiyah

hal. 22

Kembali Raih Sertifikat ISO, MUI Ingin Jadi Organisasi Modern

hal. 38



9001:2015

Mujahid Digital Berdakwah di Era Digital

hal. 16





Influencer Islam Wasathiyah

Informasi yang bersifat fitnah, hoaks, kebencian, adu domba belakangan marak bertebaran di dunia digital. Hal ini menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya di Komisi Informasi dan Komunikasi.

“Masih banyak informasi di Medsos yang perlu kita luruskan, sebab konten-konten yang tersebar hampir 80% masih berisi hoaks serta kurangnya sumber terpercaya untuk memvalidasi informasi tersebut,” kata Ketua Komisi Infor-

masi dan Komunikasi MUI KH Mabroer, Jumat (17/12).

Upaya untuk meluruskan informasi yang tidak benar di tengah pandemi Covid-19 juga diharapkan dapat menopang agar penyelesaian Covid-19 bisa berjalan secara berkesinambungan. Selain, lanjut Kiai Mabroer, saat ini masyarakat Indonesia memiliki minat tinggi terhadap ilmu keagamaan. Namun demikian, di saat bersamaan semangat keagamaan yang tinggi itu tidak dibarengi dengan narasi dan konten yang bermuatan

moderat.

Realitas itu menjadi tugas bersama MUI untuk menjadi bagian strategis memproduksi konten dakwah moderat. “Guna menghalau konten keislaman yang ekstrem serta cenderung radikal,” tambahnya.

Oleh karena itu, MUI berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam Workshop Konten Kreatif bertajuk : Bangkit dari

Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam dan Fatwa MUI.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 4-6 November 2021 di Hotel Avenzel, Cibubur, Jawa Barat ini diikuti oleh 27 MUI Kab/Kota se-Jawa Barat, perwakilan MUI DKI Jakarta, perwakilan MUI Jawa Tengah, perwakilan MUI Banten, perwakilan MUI Bengkulu dan perwakilan MUI Lampung. "Kegiatan ini diadakan agar penyelesaian penanganan Covid-19 bisa simultan, dalam penanganan Covid-19, MUI menghimbau bukan hanya menerapkan 3 M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, juga mentaati ulama dan umaro," kata Kiai Mabroer.

Usai menyelenggarakan Workshop Konten Kreatif di Cibubur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Komunikasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) juga menggelar workshop serupa di lima daerah lainnya. Yakni, di Medan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Papua.

Selain enam agenda workshop tersebut, MUI bersama Kemenkominfo juga berkolaborasi dalam dua agenda penting lainnya. Yakni pelaksanaan 20 serial webinar dan produksi konten seperti artikel, ceramah, talkshow yang dimuat melalui website, majalah, televisi, dan media pop-



Drs. Mabroer MS, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

uler lain seperti TikTok dan siaran podcast.

Dengan adanya kegiatan Workshop konten kreatif ini output yang diharapkan adalah lahirnya para content creator Islami yang mampu meng-counter hoaks dan menjadi influencer yang membunkah Islam Wasathiyah di Indonesia dengan berbagai media, metode dan situasi yang ada.

Koordinator Pelaksana Workshop yang juga Wakil Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI (Infokom MUI), Abdul Muis Sobri menjelaskan peserta workshop selama tiga hari diberi beragam materi selama kurang lebih 20 jam. Terdiri dari materi jurnalistik tulis-video-foto, desain grafis, dan publikasi konten serta praktik langsung. Peserta juga ditugaskan mem-

posting materi atau catatan terkait workshop di media sosial masing-masing.

Postingan peserta di Twitter dimonitor secara realtime melalui tagar #IslamWasathiyahMUI. Sebagai apresiasi untuk peserta, di akhir acara panitia memberikan 13 doorprize dengan berbagai kategori. Sepuluh doorprize diberikan kepada peserta dengan hasil karya terbaik, dan 3 doorprize utama diberikan untuk engagement terbanyak di Twitter.

Di tiap daerah tempat diselenggarakannya workshop, Ketua Komisi Infokom MUI Pusat, KH Mabroer didampingi utusan MUI Provinsi membacakan enam butir ikrar yang kemudian diikuti oleh peserta workshop.

Mabroer berharap, kegiatan

yang dilaksanakan 3 hari dapat membuat para peserta menjadi agen dakwah digital atau yang disebut dengan Mujahid Digital melalui unggahan positif dan mengedepankan kebenaran.

“Dengan Workshop ini akan

lahir generasi mujahid muda yang senantiasa membumikan nilai Islam Wasathiyah di ruang digital, baik media sosial, konten video dan platform digital lainnya,” demikian kata KH Mabroer.

Koordinator

Pelaksana

Workshop Abdul Muis Sobri menambahkan, dari tindak lanjut penyelenggaraan workshop ini akan ada platform gerakan yang disebut Akademi Digital MUI.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Cak Muis ini menjelas-

Literasi dan Keteladanan MUI

Pandemi memang belum berakhir, namun ikhtiar untuk mencegah menyebarnya Covid-19 terus dilakukan. Sehingga pandemi Covid-19 ini kini sudah cukup terkendali seiring dengan berjalannya program vaksinasi dan terbentuknya imunitas kelompok. Selain itu, upaya bangkit dari pandemi melalui pemulihan ekonomi juga terus digalakkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan keteladanan dan membangun literasi pandemi Covid-19 sejak awal virus mematikan itu masuk ke Tanah Air.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa akhir dari pandemi Covid-19 ini belum bisa diprediksi, bahkan WHO telah memperingatkan akan adanya virus varian baru yang lebih berbahaya.

Jokowi berharap MUI terus berperan aktif dalam membantu Indonesia terbebas dari belenggu Covid-19 dengan mewujudkan Indonesia *herd immunity* melalui vaksinasi. “MUI mengajak umat untuk mematuhi protokol kesehatan. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar, bahwa vaksin yang digunakan pemerintah adalah vaksin yang aman, dan halal,” kata Jokowi saat menyam-



Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Milad ke-46 MUI

paikan sambutan di Milad ke-46 MUI secara virtual via Zoom yang juga disiarkan langsung melalui channel TV MUI, Senin (26/7).

Dia mengungkapkan MUI selalu bermitra baik dengan pemerintah dalam menyumbang berbagai masukan konstruktif demi kemajuan bangsa Indonesia, dan mengucapkan apresiasi kepada pihak MUI yang merupakan wajah moderasi dalam beragama yang selalu istiqamah berdakwah menyemai nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Salah satu contoh keteladanan MUI di tengah maraknya hoaks tentang vakcina-

kan, peserta workshop terpilih nantinya akan diikutkan dalam program didikan selama satu tahun. Para peserta itu, tambah Cak Muis, akan diberikan tugas untuk mengelola media sosial dan media-media lainnya.

“Kami sedang menyiapkan namanya akademi digital. Kita akan menyiapkan mujahid-mujahid digital. Itu rencananya akan disiapkan per tahun ada satu sesi sebanyak 35 orang yang akan dididik selama 1 tahun. Jadi setahun rutin

untuk menjadi mujahid digital, yang akan disiapkan untuk bekerja mempersiapkan media sosial dan media-media gadget yang lain,” ujarnya. ■ (Isyati-mi Aulia/Dimas Fakhri Br/Nina Nurjanah/Angga Ulung Trang-gana/Muhammad Fakhruddin)

1 di Tengah Pandemi Covid-19



Kegiatan Vaksinasi Pengurus dan Pegawai Majelis Ulama Indonesia

si COvid-19 di awal program ini diluncurkan yakni dengan melaksanakan vaksinasi perdana terhadap 500 pengurus terdiri dari pimpinan harian sampai anggota komisi, badan, dan lembaga di MUI. Mereka akan dibagi ke dalam masing-masing kelompok yang terdiri dari 30 orang. Masing-masing kelompok tersebut juga mempunyai jadwal berbeda mulai pagi sampai sore hari. Vaksinasi akan dilaksanakan di halaman parkir MUI Pusat.

Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, vaksinasi di MUI ini bertujuan agar memberikan

teladan kepada masyarakat, bahwa ulama di MUI juga ikut melaksanakan vaksin, sebagai bentuk *hifdzun nafs*.

“Tujuan vaksinasi ini, pertama, merupakan ikhtiar pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Kedua, ini juga sebagai contoh yang baik (*qudwah hasanah*) bagi masyarakat umum,” ungkapnya Rabu (3/3).

Upaya MUI tidak berhenti sampai di situ, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan, MUI terus berupaya mensosialisasikan 12 fatwa pengendalian Covid-19 melalui media massa dan media sosial. Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar melakukan vaksinasi.

“Karena sebageian masyarakat masih ada yang menolak vaksin,” kata Kiai Cholil.

Ketua ini mengatakan, pelaksanaan vaksinasi membutuhkan dukungan serta pemanfaatan rumah ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan perguruan tinggi.

Pimpinan pondok pesantren Cendikia Amanah ini menuturkan, untuk meningkatkan sosialiasi, pemerintah diminta untuk terus merangkul kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19, dan terus meli-

batkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, kata Kiai Cholil, diperlukan juga kombinasi antara medis dan dalil-dalil keagamaan. ”Ya ada realita yang dipaparkan fenomena *science* dan medis itu,” tambahnya.

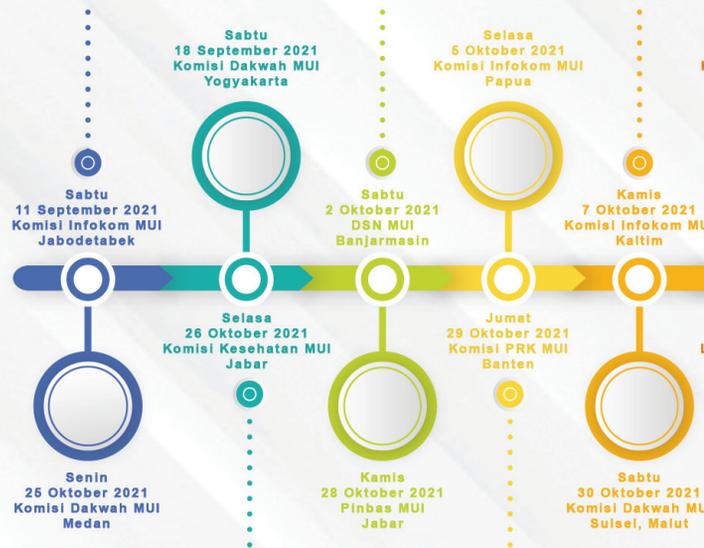
Oleh karena itu, Komisi Infokom MUI Pusat dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi menggelar 20 kali webinar yang digelar di sejumlah provinsi melalui daring. Webinar yang mengangkat tema besar “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi” itu juga melibatkan sejumlah komisi, badan, lembaga (KBL) di lingkungan MUI Pusat dan MUI Provinsi.

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Prof Henri Subiako mengatakan pandemi yang menjadi masalah global, menjadikan Indonesia menjadi bagian negara yang masif melakukan berbagai ikhtiar untuk mengurangi penyebarannya. Pemerataan vaksinasi masih menjadi pekerjaan rumah yang di dambakan oleh Indonesia.

Menurutnya, pandemi melahirkan tanggung jawab bersama dan individu. Saat ini, di tengah usaha keras negara menghadirkan vaksin untuk meminimalisir dan mengurangi penyebaran virus sangat disayangkan jika partisipasi masyarakat sangat sedikit akan program vaksinasi ini. “Orang yang tidak mau di vaksin selain ia tidak mensyukuri karunia sehat yang dimilikinya, secara tidak langsung ia juga tidak menjaga orang lain disekitarnya,” paparnya.

Prof Henri mengatakan peran para tokoh sangat berpengaruh yang mana saat ini dengan basis digital mereka bisa menggerakkan banyak orang. Para kiyai, ulama dan da’i melalui komoditas digital dan sosial media dengan *follower* yang tidak sedikit akan memberikan optimisme yang bisa menciptakan

Rangkaian Webinar Literasi Pa (Kerja Sama Komisi I Indonesia-Kementerian In



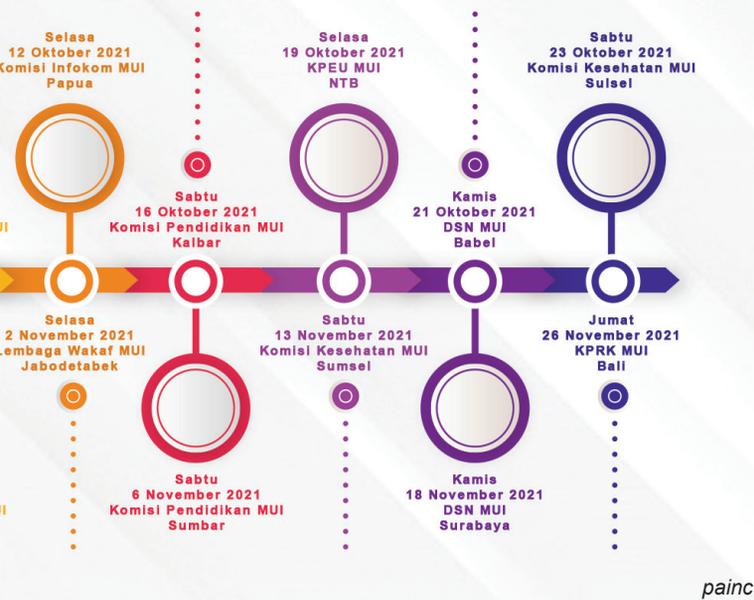
perubahan yang signifikan.

Mengingat peran mereka sangat berpengaruh minimal dari lingkup kecil mereka berada, melalui media digital gerakan positif itu bisa diakses dan diterapkan oleh siapa aja saat ini. “Para ulama dan pemimpin agama adalah *opinion leader* yang sangat ril di lapangan. Maka dengan hal ini penting sekali peran serta mereka agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan program vaksinasi berhasil,” ujarnya.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat KH Masduki Baidlowi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah untuk memerangi hoaks pandemi Covid-19.

Kiai Masduki menuturkan, salah satu tugas inti MUI adalah mengeluarkan fatwa. Terkait dengan masalah hoaks, Kiai Masduki

Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Infokom Majelis Ulama Informasi dan Komunikasi)



mengungkapkan bahwa sejak 2017, MUI sudah mengeluarkan fatwa menghadapi fitnah dan hoax.

Meski demikian, Kiai Masduki mengingatkan, jika diibaratkan fatwa itu mobil, kalau tidak ada rodanya maka tidak akan bisa berjalan. Atas dasar itulah, Kiai Masduki mengakui pentingnya sosialisasi dan kerjasama antara MUI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankannya.

Terkait dengan hoaks Covid-19, Kiai Masduki membandingkan dengan kisah Nabi. Pada zaman itu, saat Rasulullah ditimpa hoax, masyarakat Madinah sudah solid melawan sehingga teratasi dengan baik.

“Nabi sendiri tidak mampu mengatasi persoalan sebenarnya. Tapi, akhirnya ada intervensi langsung wahyu turun ayat surah An-Nur yang terklarifikasi semuanya selesai,”

ujar Kiai Masduki.

Maka dari itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja keras untuk mengatasi hoaks Covid-19, terutama persoalan sistem informasi.

Kiai Masduki mengingatkan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Indonesia merupakan dampak *multiplier effect* dari pandemi Covid-19. Terlebih biasanya informasi yang terjadi di tengah masyarakat semakin menyulitkan penanganan atas dampak yang dirasakan masyarakat.

Menurut Kiai Masduki, Indonesia merasakan dampak lebih besar dengan adanya kesenjangan ekonomi. Sebab, kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, baik itu secara suku, agama maupun budaya. Karenanya Kiai Masduki menegaskan, diperlukan upaya bersama membangkitkan perekonomian berbasis digital.

Ditekankan Stafsus Wapres ini, penggunaan media digital yang tinggi saat pandemi, memaksa semua kalangan berpartisipasi di dalamnya. Hal ini dikarenakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada ruang publik beralih dari rumah dengan media digital melalui akses internet.

Lebih jauh, Kiai Baidowi mengatakan, melalui ekonomi digital, masyarakat tidak perlu menyediakan lahan strategis untuk usahanya. Argumentasinya, pemasaran via digital bisa dilakukan dimanapun dan menjangkau akses yang lebih luas.

“Pemerintah dan MUI perlu melakukan program selanjutnya mengenai ekonomi digital yaitu dengan mengadakan pelatihan. Karena ekonomi berbasis digital tanpa pelatihan mengurangi pemanfaatannya untuk mengatasi perekonomian nasional,” jelas Kyai Masduki. ■ *(Isyatami Aulia/Sadam Al Ghifari/Nina Nurjanah/Nurul/ Nashih Nasrullah/Angga Ulung Tranggana)*



IJTIMA ULAMA MUI BERIKAN SOLUSI BAGI ANAK BANGSA

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI menggelar Ijtima Ulama yang dihadiri oleh ketua Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. Ijtima Ulama ke-VII ini bertajuk: “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-11 November 2021.

Ijtima Ulama yang resmi ditutup Kamis (11/10) menyepakati 17 keputusan fatwa. “Musyawarah sudah kita lakukan, hasil-hasil telah kita sepakati, dengan hasil ini kita bertawakal kepada Allah mu-

dah-mudahan ini bisa menjadi panduan di dalam mewujudkan baldatun, toyyobatun, dan warrobbun ghafur,”kata dia Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh dalam sambutan penutupan Ijtima Ulama.

Terdapat 12 bahasan dalam Ijtima Ulama kali ini, yaitu makna jihad, makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai dan juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan, panduan pemilu dan pemilukada yang lebih bermaslahat bagi bangsa, dan

distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan.

Selain itu, mengenai hukum pinjaman *online*, hukum transplantasi rahim, hukum *cryptocurrency*, penyaluran dana zakat dalam bentuk *qardhun hasan*, hukum zakat perusahaan, dan hukum zakat saham.

Kiai Asrorun Niam mengatakan, selama berjalannya Ijtima Ulama ketujuh ini terjadi permusyawaratan yang saling menguatkan dan mengokohkan. Hal ini lantaran menjadi wujud dari *shillatul fikri* (ketersambungan pemikiran) yang terjadi karena pertim-

bangun kemaslahatan.

“Perdebatan ide, gagasan yang justru menguatkan dan mengokohkan, serta meneguhkan ukhuwah dan juga kebersamaan di antara kita,”ujarnya.

Kiai Asrorun Niam menambahkan, selama berjalannya musyawarah tidak didasarkan kepada kepentingan yang bersifat personal baik *ananiah* (egois), *hizbiyyah* (fanatik sempit), dan lainnya.

“Ini hal yang patut kita syukuri bahwa musyawarah didasarkan kepada ide, ilmu, dan hikmah akan saling menguatkan dan mengokohkan,”tambahnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Nahdliah ini mengungkapkan, kesepakatan sebagai bagian dari wujud komitmen untuk optimalisasi fatwa guna mengoptimalkan kemaslahatan bangsa.

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar mengatakan, MUI yang menjadi majelisnya para ulama mempunyai tugas memberikan solusi bagi anak bangsa dalam segala tatanan dan aspek kehidupan.

Kiai Mif, demikian akrab disapa menjelaskan, di dunia ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan syariah. Keberadaan ulama dalam berbagai sektor kehidupan adalah memberikan solusi.

“Maka hampir seluruh hidup para ulama adalah berupaya memberikan solusi



KH. Miftachul Akhyar memberikan sambutan pada Ijtima Ulama

disamping kemudahan-kemudahan islam disyariatkan agama yang mudah, Agama yang penuh cinta kasih,” ujarnya dalam sambutan Ijtima Ulama, Selasa (9/11).

Kiai Mif menjelaskan, Ijtima Ulama yang digelar setiap 3 tahun sekali ini untuk melaksanakan tugas mulianya memberikan solusi dalam segala hal.

Ia mengingatkan bahwa tugas yang diemban ulama sangatlah mulia, sekaligus mengkhawatirkan. Sebab, keselamatan dunia akhirat umat ada di tangan para ulama.

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dalam penutupan Ijtima Ulama menyampaikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan selama berlangsungnya Ijtima Ulama sangat memberikan

manfaat bagi kemaslahatan umat.

Gus Yaqut mengatakan Ijtima Ulama merupakan tradisi keberislaman yang positif. Apalagi, bangsa Indonesia dikenal sangat religius.

Gus Yaqut berpandangan bahwa ulama dan cendekiawan memiliki peran memberikan solusi agar keberagaman dan keberagaman umat tidak mengalami stagnasi atau *jumud*.

“Karenanya, sudah tepat jika MUI secara berkala menyelenggarakan Ijtima Ulama. Peran strategis ulama yang memang nyata sejak era kemerdekaan hingga kini bisa ditunjukkan dalam forum-forum seperti yang dalam 3 hari ini kita laksanakan,” tambahnya.

Ditambahkan Gus Yaqut, relasi antara umara dan ula-

ma yang terjalin merupakan faktor penting dalam merawat harmoni bangsa. “Ke-

hadiran Majelis Ulama Indonesia memberikan manfaat yang luar biasa untuk mewu-

judkan dan merawat harmoni yang merupakan tanggung jawab bersama. Saya kira ini

Hukum Pinjol dan Rekom

JAKARTA — Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII yang digelar pada 9-11 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaquut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11).

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat.

Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Hasil pembahasan dan rekomendasi Ijtima Ulama MUI antara lain tentang ketentuan hukum pinjaman online, tinjauan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, dan tentang distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan. Berikut ini keterangan lengkapnya:

Ketentuan Hukum Pinjaman Online

1. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad tabarru' (kebaikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.

Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (*aib*) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (*mustahab*). Layanan pinjaman baik *offline* maupun *online* yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Atas dasar hasil pembahasan, Ijtima Ulama merekomen-

dasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, POLRI, dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau *finansial teknologi peer to peer lending (fintech lending)* yang meresahkan masyarakat. Pihak penyelenggara pinjaman *online* hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil pembahasan Ijtima Ulama tentang tinjauan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1. Minuman Beralkohol

menjadi kekuatan besar jika kita mampu memanfaatkan dengan baik keharmonisan

bangsa yang sangat luar biasa ini,” kata Gus Yaqut. ■
(*Isyatami Aulia/Sadam Al-Ghi-*

fari/Angga Ulung Tranggana/Nashih Nasrullah/Muhammad Fakhruddin)

Landasan Ijtima Ulama MUI

(*minol*) pada kenyataannya lebih banyak memberikan dampak merugikan daripada menguntungkan. Negara memang mendapatkan keuntungan ekonomis dari pendapatan cukai dan pajak Minuman Beralkohol. Akan tetapi dampak merugikan yang ditimbulkan Minuman Beralkohol sangat besar baik bagi pelaku yang meminum maupun bagi masyarakat umum. Minuman Beralkohol telah memicu lahirnya berbagai tindak pidana kriminal maupun faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa manusia. Oleh karenanya, negara harus hadir untuk mengatur Minuman Beralkohol. Sesuai amanat Konstitusi, yaitu Preambule UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia. Negara harus menerbitkan regulasi mulai dari pencegahan (*preventive*), pengurangan resiko (*preparedness*), daya tanggap (*response*), serta upaya pemu-

lihan (*recovery*) akibat Minuman Beralkohol.

2. Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai Agama menjadi sumber berpijak dalam bernegara. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Berlandaskan ajaran agama, bahwa semua agama melarang minuman dan beralkohol. Islam dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 90, dan hadis-hadis Nabi, serta kaedah ushuliyah, serta fatwa MUI, menegaskan bahwa khamar, alkohol, minuman dan makanan beralkohol adalah haram:

4. Fatwa MUI No. II Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, dan Fatwa MUI No.

10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol, menegaskan bahwa hukum alkohol, makanan dan minuman yang mengandung alkohol adalah haram, haram untuk memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman Beralkohol.

5. Dari segi kesehatan, berdasarkan UU Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Penggunaan NAPZA menjerumuskan pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola *mala daptive* dan menimbulkan syndrome yang secara klinis serta disertai adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman beralkohol merusak kesehatan baik fisik maupun mental. Alkohol mengancam organ tubuh seperti hati, jantung, pankreas, saluran cerna,

sampai susunan saraf pusat, bahkan berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

6. Aspirasi masyarakat di berbagai daerah menginginkan agar minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol dan banyak jatuh korban jiwa di berbagai daerah. Kebutuhan payung hukum yang tegas melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang mengatur larangan minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang Minuman Beralkohol.

7. Dalam penyusunan Undang-Undang Larangan Minol, negara hendaknya merujuk kepada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.

RUU Larangan Minuman Beralkohol yang telah sejalan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk

Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol agar segera disahkan menjadi UU



Hasil pembahasan Ijtima Ulama tentang distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan adalah sebagai berikut:

1. Islam mengakui hak kepemilikan atas tanah dengan maksud untuk dimakmurkan dan didayagunakan demi kemaslahatan dan pelestariannya;

2. Pengakuan hak milik atas tanah dan pengelolannya tidak serta merta ada hak untuk menelantarkan dan eksploitasi berlebihan, oleh karena itu Pemerintah wajib mencegah terjadinya hal tersebut;

3. Pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi sengketa terhadap hak kepemilikan atas tanah dan belum memiliki keputusan pengadilan yang berkuat hukum tetap (*inkracht*) serta dari penyerobotan, mafia tanah, dan dari kekuatan pemodal yang berdampak kepada peminggiran masyarakat kecil;

4. Pemerintah wajib melarang pengalihan lahan produktif yang didayagunakan untuk kebutuhan pa-

ngan dan hajat hidup orang banyak kepada pemanfaatan lain, baik pribadi maupun korporasi yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok;

5. Alih fungsi lahan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dan anti-sipasi terhadap dampak lingkungan serta pertimbangan tata ruang;

6. Pemerintah wajib menjamin distribusi tanah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan

mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan;

7. Pemerintah wajib menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap tanah



untuk kebutuhan pokoknya, dan Pemerintah haram membiarkan ketidakadilan dalam distribusi tanah;

8. Pemerintah dapat

ka waktu tertentu;

9. Pemerintah wajib mempertimbangkan kemampuan pengelola dan rasa keadilan masyarakat dalam hal kebijakan pemberian hak pengelolaan lahan;

Orang atau badan hukum yang telah diberikan hak pengelolaan lahan atau aset pertanahan harus mendayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang berkeadilan dan tidak boleh menelantarkannya. Dalam hal terjadi penelantaran, maka Pemerintah wajib menarik kembali dan memberikan kepada yang membutuhkan;

Pemerintah dapat mengambil hak kepemilikan tanah untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Dalam hal Pemerintah membutuhkan lahan masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, harus ada kompensasi yang layak dan memikirkan terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut secara berkelanjutan; dan

Kemaslahatan umum dalam pembebasan lahan masyarakat tersebut harus bersifat konkret, jangka panjang, dan menyeluruh serta tidak hanya diperuntukkan

bagi golongan tertentu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial.

Rekomendasi

1. Peserta Ijtima' Ulama mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendistribusikan lahan bagi masyarakat miskin dan pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat untuk merealisasikan kemaslahatan;

2. Pemerintah perlu mengidentifikasi penguasaan swasta atas tanah yang berlebihan serta mengevaluasi atas pemberian hak pengolaannya guna didistribusikan kepada masyarakat secara berkeadilan;

3. Pemerintah perlu mengatur tata kelola kepemilikan lahan untuk menjamin harmoni sosial dan melindungi rakyat kecil, sehingga tidak terjadi hukum rimba atas dasar kapital yang memarginalkan masyarakat tertentu terutama penduduk asli;

4. Pemerintah perlu mengendalikan dengan sungguh-sungguh harga tanah agar tidak diserahkan kepada mekanisme pasar secara absolut yang berdampak kepada penguasaan lahan oleh kelompok tertentu. ■
(*Isyatami Aulia/Sadam Al-Ghifari/Azharun Niam/Angga Ulung Tranggana/Nashih Nasrullah/Muhammad Fakhruddin*)

m e n d i s -
tribusikan lahan untuk merealisasikan kemanfaatan dengan memberikan hak pengelolaan lahan selama jang-



Mujahid Digital Berdakwah di Era Digital

KH. Masduki Baidlowi, M.Si

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi.

Infokom MUI gencar melakukan workshop dan seminar konten kreatif khususnya bagi kalangan milenial. Di beberapa daerah Infokom MUI juga menginisiasi lahirnya Mujahid Digital. Seperti apa peran Infokom dalam menggandeng milenial untuk berdakwah di era digital? Berikut ini wawancara Mimbar Ulama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi.

Apa yang menjadi kekhawatiran MUI terhadap generasi milenial sehingga Infokom MUI gencar melakukan workshop dan seminar konten kreatif?

Jadi ada beberapa strategi terkait pentingnya MUI mempunyai visi yang tajam kedepan dan visi itu menjadi Islam *wasathiyah* yang diusung oleh MUI tentang bagaimana negeri ini 25 sampai 50 tahun mendatang harus terus terpelihara tentang negara yang berpandangan dan berwawasan Islam *wasathiyah*, yang nyambung dengan konsep kenegaraan NKRI. Hal ini harus kita jaga dan anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z juga mempunyai pemahaman yang sama. Langkah strategisnya itu apa? Langkah-langkah strategisnya itu adalah bahwa kita harus memiliki langkah-langkah yang harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, khususnya yang berkaitan dengan media digi-

tal dan sekarang kita mengalami yang namanya pergeseran atau *shifting* di dalam cara kita berkomunikasi, berbisnis, berpolitik dan berdakwah.



mui.or.id

KH. Masduki Baidlowi, M.Si, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi



KH. Masduki mengisi materi saat Workshop Mujahid Digital

Semuanya berubah dan MUI menyadari bahwa ormas-ormas Islam termasuk MUI, itu ternyata rata-rata masih mempunyai kesadaran terlambat atas perubahan. Perubahan itu terjadi, bahwa anak-anak muda sudah semakin lengket dengan komunikasi berbasis digital, sementara kita kalangan yang bukan milenial itu masih menggunakan cara-cara lama dalam berdakwah. Perubahan-perubahan ini harus ditangkap sebagai sebuah momen di mana kita tidak boleh tertinggal. Karena kita tidak boleh tertinggal maka MUI harus merespon sesuai dengan visinya tadi, bagaimana dakwah kita ke depan bisa dimengerti oleh kalangan kalangan milenial juga mengerti oleh kalangan kalangan generasi yang lebih muda lagi dan seterusnya.

Jangan sampai kita berdakwah hanya dipahami oleh orang-orang tua. Orang tua berangkat ke barat dan anak-anak mudanya berangkat ke timur, ini saya kira tidak lucu, jika dakwah kita seperti itu, dalam konteks itulah kita melakukan segala hal dan segala cara dengan siapapun untuk kepentingan ini sebagai sebuah latar belakang.

Yang kedua kita sedang menghadapi masalah serius bahwa anak muda memahami hijrah itu. Seakan-akan berhijrah dengan cara berkhi-lafah, ada yang memahami hijrah seperti itu, dan hal yang demikian itu sedang digencarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai

dengan konsep kenegaraan kita. Dan juga merupakan tantangan yang serius menurut saya, karena kalau kita berbicara di media sosial berbasis digital, seperti yang saya bilang, informasi itu tidak lagi mengenal siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas.

Jadi bisa saja orang dalam kuantitas banyak tapi tidak mewakili dalam media sosial. Kalangan minoritas bisa menjadi mayoritas di dalam media sosial, karena apa? Seperti yang saya bilang hukum di dalam media sosial itu dalam hukum deret ukur bukan dengan deret hitung, sementara dakwah-dakwah kita yang konvensional itu bergerak berdasarkan deret hitung bukan dengan deret ukur. Ini saya kira harus menjadi kesadaran kita bersama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa dakwah ke depan dan dalam konteks bagaimana mempertahankan yang memiliki Islam wasathiyah yang kompatibel dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus kita pahami kepada generasi muda dan generasi Z dan yang lebih muda lagi untuk faham bersama-sama. Yang ketiga ini saya kira juga adalah bagian dari literasi untuk semuanya, kenapa kita bergerak untuk keliling Indonesia demi kepentingan seperti itu.

Melalui kegiatan workshop tersebut, output dan outcomes seperti apa yang diharapkan MUI ?

Mimpi kita adalah ada anak-anak dari kita MUI yang menguasai multiplatform berbasis media digital ini. Sehingga dia bisa berdakwah menjadi agen-agen perubahan yang bisa mengisi konten-konten Islam *washathiyah* yang menarik buat anak muda. Selama ini Islam *washathiyah* dipahami oleh orang-orang tua, di dalam buku-buku tebal dan di dalam kitab-kitab kuning dan semuanya anak muda tidak suka itu. Bagaimana caranya itu dibuat menjadi meme yang menarik dan ditransformasi ke dalam tulisan yang pendek yang mudah dipahami kalangan muda misalnya. Dan itu tidak mudah

karena itu butuh talenta tapi saya kira tidak masalah, karna kita akan melakukan ini, sampai akhirnya melahirkan kader-kader muda seperti yang saya sebut Mujahid Digital itu.

Di beberapa daerah MUI dan kaum milenial mendeklarasikan Mujahid Digital, bisa dijelaskan gerakan apa ini Kiai?

Seperti yang saya bilang itu, Mujahid Digital itu adalah kira-kira tipe ideal bagi seorang santri modern yang memiliki *skill* yang memadai terkait dengan alat-alat teknologi modern di satu sisi, dan di sisi lain dia menguasai konten Islam *washatiyah* dengan baik. Lalu dari kedua sisi ini, baik dia memahami konten digital dengan baik dan memahami Islam *washtiyah* yang benar lalu keduanya itu bergabung dengan dirinya sebagai santri modern dan dia adalah kader Majelis Ulama Indonesia yang membawa Islam washtiyah dan mampu mempengaruhi anak anak muda. Ibaratnya dia menajdi tokoh ideal atau *influencer* yang memiliki *follower* jutaan orang dan memiliki pemahaman Islam *washatiyah*, kira kira seperti itu.

Ini bukan buzzer ya Kiai?

Bukan. Ini *influencer*.

Peran seperti apa yang diharapkan MUI bagi para Mujahid Digital di tengah maraknya hoaks yang kerap memecah belah umat dan bangsa.

Ya itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa kalau sudah tercipta kader kader seperti itu, maka perang hoaks akan ternetralisasi karena seperti yang saya bilang tadi bahwa hoaks itu punya penyakit seperti yang tadi, bahkan bukan hanya hoaks tapi informasi di *multiplatform* yang berbasis digital itu mempunyai karakter seperti yang saya bilang tadi yaitu antara deret ukur dan deret itung tadi, itu satu. Yang kedua, seperti yang telah saya sampaikan ke banyak



Workshop Bangkit dari Covid19 dengan Nalar dan Aksi Bersama

orang atau di kegiatan Infokom MUI yang lain, bahwa salah satu titik lemah dari *multiplatform* dari *google* itu algoritma kurasi, algoritma itu apa? Algoritma kurasi Itu adalah sebuah mesin yang punya kecenderungan memasok informasi-informasi sesuai dengan kehendak dan kecenderungan kita. Kalau kita cenderung senang dengan berita hoaks yang berlatar belakang konspiratif misalnya maka saya besoknya akan dipasok sedemikian rupa, banyak berita-berita yang seperti itu. Begitu juga kalau satu kelompok memiliki kesenangan dan minat yang sama, kita akan dipasok dengan berita-berita seperti itu maka kemudian Terjadilah apa yang disebut dengan bias konfirmasi, bias informasi. Dan akhirnya kita cenderung menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Itulah yang kemudian akhirnya timbul satu istilah yang namanya disebut dengan *echo chamber effect*. *Echo chamber effect* adalah situasi di mana seseorang enggan melihat atau mendengar gagasan, perspektif, atau alternatif lain yang berbeda dari perspektifnya sendiri. Kemudian se-



sebagai langkah awal MUI untuk mencetak Mujahid Digital

seorang itu lebih suka mendengar gagasan dari orang-orang yang pemikirannya seragam dengan dirinya saja.

Jadi berdentung dalam ruang, dari hoaks ke hoaks itu saja yang kita terima dan kita tidak menerima informasi yang lain. Bahaya dari *multiplatform* berbasis digital itu salah satunya itu. Itu yang harus kita perangi dan itu sebenarnya punya kecenderungan bagi siapa saja. Kita juga punya kecenderungan seperti itu. Apa yang kita terima ada kecenderungan untuk kita pahami sebagai sebuah kebenaran dan cenderung kita untuk menolak terhadap alternatif paham yang lain. Ini bahayanya dari *Google* yang akan memasok kita informasi-informasi yang seperti itu. Nah ini yang harus kita perangi terkait dengan hoaks itu kira-kira seperti itu.

Selain mengajak dan melatih milenial Muslim untuk membuat konten positif, tampaknya MUI terus berbenah di internal dengan platform digitalnya yang mengusung brand MUIDigital, apa

makna di balik transformasi digital ini?

MUI sekarang menjadi satu-satunya ormas Islam yang sudah punya ISO artinya secara strategis di situ menggambarkan orang melihat MUI itu mestinya melihat di baliknya gambar itu adalah manajemen yang baik. Arti manajemen yang baik itu tidak sederhana tapi berbagai aspek harus menggambarkan bahwa MUI itu adalah punya makna-makna yang semuanya kira-kira bisa diartikan maju dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek yang berhubungan dengan bagaimana cara berkomunikasi di MUI. Orang akan melihat mesin MUI itu seperti apa kalau meraih Sertifikasi ISO 9001:2015. Mesin dakwahnya seperti apa? Mesin yang lain seperti apa? Itu akan dilihat. Kita harus tampilkan yang baik, secara penampilan yang baik itu adalah bahwa kita harus ada di garda depan dalam konteks ormas Islam di dalam memahami peta dakwah media yang menggunakan alat media sosial dan kita harus berada di garda depan. Itulah sebabnya maka kita harus berpacu ini, jangan sampe kita tertinggal dari ormas-ormas yang lain, kira-kira seperti itu.

Kabarnya Infokom MUI juga tengah mempersiapkan Akademi Digital MUI, bisa dijelaskan program apa ini Kiai?

Ya itu tadi, Akademi Digital MUI itu, seperti di Muhammadiyah ada pengkaderan berbasis digital dan kalau di NU istilahnya Madrasah Kader Nahdatul Ulama, jadi saya kira di MUI sama titik tekannya. Yang pertama itu, adalah ideologisasi konsep pemahaman Islam *washatiyah* dan di satu sisi perubahan konsep-konsep yang lama ke dalam konsep konsep yang baru yang berbasis media digital. Lalu kemudian ideologisasi tidak cukup sampai di situ, kemudian kader kader MUI itu yang terpenting memahami cara dan metode dakwah yang baru. Saya sering mendengarkan pepatah arab yang



KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum MUI memberikan arahan pada acara Workshop Bangkit dari Covid19 dengan Nalar dan Aksi Bersama

mengatakan begini, bahwa *atthoriqotu ahammu minal maddah* bahwa metodologi itu lebih lebih penting daripada konten. Konten itu artinya kita punya konten banyak tetapi kalau tidak punya metodologi yang mutakhir yang efektif ya kita kalah dengan orang lain. Sayyidina Ali pernah mengatakan *al-haqqu bila nidzomin yaghlibuhul bathil bin nidzhom* yang artinya kebenaran yang tidak ditata secara sistematis organisatoris itu akan kalah dengan kebatilan yang tertata secara sistematis dan organisatoris itu.

Nah, kita tidak boleh begitu, kita punya kebenaran itu harus tertata dengan baik, katakan dengan baik itu juga harus meliputi metode-metode yang terbaru, metode dakwah yang terbaru saya kira adalah media sosial, alat digital dan *platform* yang berbasis digital. Sehingga ini menjadi sangat penting, itu juga punya latar belakang yang tidak boleh kita lupakan bahwa saat ini ancaman kita adalah ancaman seperti yang kita kenal bahwa ada satu buku namanya *The Death of Expertise* yang artinya matinya

kepakaran, jadi sekarang tuh anak muda sekarang itu nggak percaya lagi dengan ulama, nggak percaya lagi dengan ustadnya, karena semuanya ada di *Google*. Semuanya ini saya kira tantangan kita bersama. Dan betapa bahayanya kalau kemudian kepakaran itu mati dan lalu kemudian anak-anak muda kita hanya percaya kepada *Google* dan *Google* isinya seperti yang saya bilang tadi, hijrah itu maknanya apa? hijrah dari NKRI ke sistem khilafah, lah kan cilaka kalau misalnya seperti itu. Yang dikenal di dalam *Google* itu adalah sistem kenegaraan itu bahwa NKRI itu tidak benar, yang benar itu adalah khilafah dengan berbagai argumentasi yang canggih misalnya. Sementara yang sistem NKRI itu tidak ada argumentasi yang canggih maka itu anak muda akan terpengaruh. Nah, di situlah saya kira matinya kepakaran itu harus kita respon dengan cara-cara bahwa konten-konten yang bagus dari Islam *washatiyah* itu harus mewakili mayoritas dalam media sosial. ■

(*Jakfar Shodiq/Muhammad Fakhruddin*).

**Menua itu takdir,
sehat itu pilihan**
**Ayo Pakai Masker,
Ayo Segera Vaksin!**



#MulaiDariKamu Lindungi Keluarga, Lindungi Indonesia

Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Sebagai Duta Islam Wasathiyah



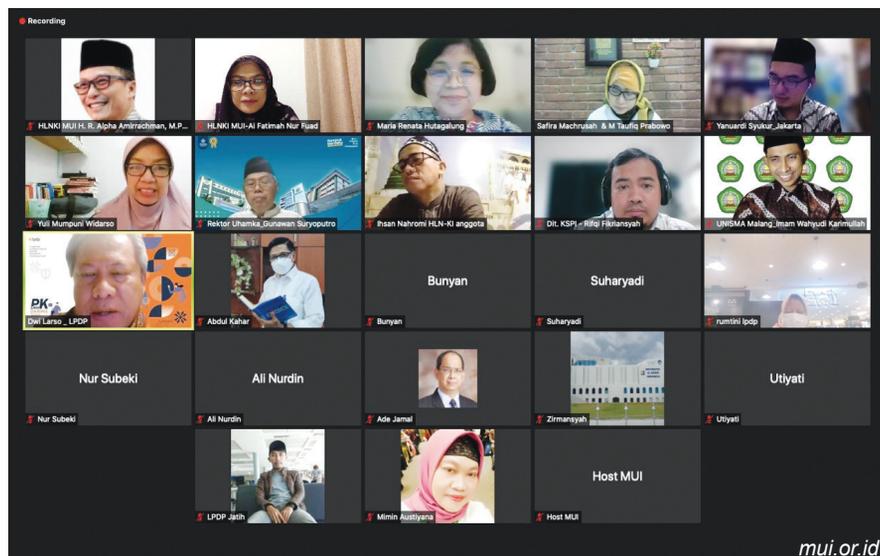
Pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing di negara-negara berkonflik atau negara-negara kaya merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. Beasiswa tersebut tidak hanya berguna bagi diplomasi

tapi juga untuk akreditasi dan *perankingan* universitas.

Demikian salah satu kesimpulan dalam Diskusi Virtual terkait Prospek Beasiswa untuk Mahasiswa Asing yang digelar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

MUI pada Rabu (8/12).

Wakil Ketua Sub-Komisi HLNKI MUI, R Alpha Amirrachman, berharap agar acara ini dapat memperoleh informasi yang kredibel dalam memperoleh beasiswa. Terutama beasiswa untuk mahasiswa



Diskusi Virtual terkait Prospek Beasiswa untuk Mahasiswa Asing

asing yang berada di negara-negara konflik.

Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Luar Negeri, Maria Renata Hutagalung, memaparkan terkait pemberian beasiswa sebagai instrumen diplomasi Indonesia.

Dia menjelaskan yaitu antara lain rencana strategis Kemenlu 2020-2024 untuk memperkuat strategi diplomasi publik Indonesia melalui kerjasama sosial kebudayaan, promosi kuliner, dan promosi nilai-nilai Indonesia, pemberian beasiswa, dialog lintas agama, *people to people contact*, jejaring diaspora Indonesia, dan *Indonesianist*.

Selain itu, kata Maria, mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk mem-

perkuat diplomasi publik.

Pada saat ini, menurut Maria, beasiswa belum menjadi bagian dalam direktorat hubungan internasional. Beasiswa untuk mahasiswa asing terdiri dari Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI)/ *International Arts and Culture Scholarship (IACS)*, dan beasiswa dari Perguruan Tinggi di Indonesia.

“Beasiswa darmasiswa adalah beasiswa yang ditawarkan untuk warga asing dari negara yg menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dan mengenalkan bahasa Indonesia dan budaya. Dilaksanakan sejak 1974 inisiatif ASEAN, dan 1976 diperluas di luar ASEAN. Jumlah negara lebih dari 110 yang dikelola Kemendikbud Ristek,” lanjut Maria.

Dia mengatakan, IACS dikelola sendiri Direktorat Diplo-

masi Publik, Kemlu, ditujukan untuk mempromosikan seni budaya Indonesia. Termasuk beasiswa non-gelar, program hanya dua bulan. BSBI ada sesi mengenalkan bahasa Indonesia dan bermitra dengan berbagai sanggar dan PT seni di Indonesia.

Dia menambahkan IACS merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dan meningkatkan persahabatan. Kurikulumnya adalah bahasa, seni-budaya, kunjungan tempat sejarah.

Dia menuturkan, tawaran beasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia di antaranya dari Universitas Al-Muslim Aceh dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan manfaat atau hasil pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing: bentuk *soft power* diplomasi Indonesia, menambang jejaring pemuda yg disebut *friends of Indonesia*. Lanjut Renata, “Saat ini belum ada program beasiswa yang secara spesifik diperuntukkan untuk negara-negara konflik di Timur tengah,” kata dia.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud Ristek, Abdul Kahar, menjelaskan bahwa pada 2020 program beasiswa darmasiswa ditunda karena pandemi. Beasiswa masih fokus pada peningkatan SDM di lingkungan Kemendikbud

Ristek. Untuk beasiswa yang diperuntukkan oleh WNA hanya darmasiswa.

Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menjelaskan, LPDP berfokus pada tiga layanan, yaitu beasiswa, pengembangan dana, dan riset. Untuk saat ini, LPDP telah memberikan beasiswa master sebanyak 18.833 kepada 9.024 mahasiswa di dalam negeri, dan 9.809 mahasiswa di luar negeri.

Untuk program doktoral, beasiswa telah diberikan kepada 6.590 di dalam dan luar negeri. Sebanyak 6.369 mahasiswa *native on going* yang saat ini menerima beasiswa dari LPDP (68,86 persen di dalam negeri).

Pada sesi diskusi, Rektor Uhamka, Prof Gunawan Suryoputro, menceritakan bahwa sejak 2005 swasta Muhammadiyah melalui Litbang sudah memberikan beasiswa kepada negara-negara konflik dimulai dari Thailand selatan, dan berjalan sampai sekarang.

Dia menjelaskan, terdapat dua kendala dalam melaksanakan program beasiswa untuk mahasiswa asing. *Pertama*, PTS hampir tidak memiliki program internasional, dan pilihannya tidak bebas.

“Kendala Dosen kami sedikit yang bisa bahasa Arab dan sedikit yang bisa bahasa Inggris. *Kedua*, keterbatasan pendanaan. Termasuk *dormitory* dan soal konsumsi serta jaminan kesehatan,” lanjutnya.



Ilustrasi pengisian formulir beasiswa

Solusi dan saran yang ditawarkan Prof Gunawan adalah perlunya *predict future* dan ada orientasi untuk program-program terlebih dahulu. Untuk perguruan tinggi swasta lebih diperhatikan, baik soal dormitory, dan makan.

“Jika LPDP bekerjasama dengan kementerian, MUI, dan lainnya memiliki skema untuk mahasiswa asing, saya rasa itu akan sangat membantu. Program pembinaan mahasiswa asing kurang signifikan karena jumlah universitas yang dijangkau,” jelas Prof Gunawan sembari menambahkan selain itu, kolaborasi dengan Dubes Indonesia yang ada di luar negeri juga sangat penting, dan MUI harus cekatan

dalam mencari mitra, serta harus membuat skema dan *road-map* yang detail.

Peserta lainnya, Imam Wahyudi dari Unisma Malang, menceritakan bahwa Unisma memiliki mitra alumni dari 34 negara, dan ada beberapa program seperti *degree* dan *non-degree* sekitar 400 lebih mahasiswa internasional, ada yang program s1 dan s2.

Dia menyebutkan, setiap tahun UNISMA beri beasiswa kepada 42 mahasiswa inter untuk negara mana saja yang memenuhi persyaratan. Rektor memberikan kebijakan mahasiswa s1 maksimal selama empat tahun dan s2 maksimal selama dua tahun. Untuk mahasiswa dari Afghanistan ada

mengikuti program master.

“Kami mengirimkan mahasiswa 30 orang ke Rusia dan begitu sebaliknya. Kami juga mengadakan webinar series selama sebulan,” lanjut Imam.

Sementara itu, wakil dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr Zirmansyah, menuturkan UAI belum pernah memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing, hanya memberikan pertukaran mahasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan Tinggi penting mendapatkan mahasiswa asing karena terkait akreditasi.

Mantan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Yuli Mumpuni Widarsom, yang juga pengajar

di kampus menceritakan pula bahwa tantangan mahasiswa asing ada pada prodi yang dibutuhkan dan bahasa. Oleh-nya itu, dia mengusulkan agar MUI memetakan potensi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan negara-negara yang akan ditawarkan untuk itu.

Sementara itu, wakil dari UGM, Suharyadi, menjelaskan UGM memiliki mahasiswa asing cukup banyak dan tidak ada kendala untuk *dormitory*. Ada juga yang mahasiswa reguler karena ada kelas internasional. Untuk beasiswa UGM diselenggarakan sampai pada 2019 karena terkendala pandemi. Ada alokasi dana untuk mahasiswa-mahasiswa asing.

“UGM siap untuk kontribusi dalam mendukung program yang digagas oleh MUI,” ujar dia.

Ketua Komisi HLNKI MUI, Bunyan Saptomo, menyampaikan *closing statement* tentang pentingnya diplomasi beasiswa, mewakili Ketua MUI Bidang HNLKI Prof Sudarnoto Abdul Hakim.

Bunyan menyatakan, diplomasi beasiswa MUI sebagai pelaksanaan dua peran MUI, yaitu *himayatul ummah* (melindungi umat Islam *via* pendidikan) dan *shadiqul hukumah* (menjadi *partner* pemerintah dalam promosi Islam wasathiyah). ■ (Rafa Basyirah/Ai Fatimah Nur Fuad/Yanuardi Syukur/Nashih Nasrullah).



این کتاب مپتا کر فریحال جفجوئن کیت

سکیدا و مولانا

محمّد صلی الله علیه و سلم

دشن سبوتن مولودت دان معراجن دان سبکل کلکوانن دان
 فرکتانن دان بودی بهسات ، یغ سکلین ایت ایلو دان هاروم
 هیغاک دروفاکن دشن بوغاروس دباوا این :



یعنی یغ ادا دالم بوغه این تر تولس ایتوله تمام این کتاب ارتین
 این سواة بوغه یغ هاروم مکار بر میسم محکایتکن فریحال ایهندات
 قاسم یا ایتوله جفجوئن کیت نبی محمد صلی الله علیه و سلم کراغر همب یغ
 ضعیف عثمان به عبدالله به عقیل به نجی عفا الله عنه و عه والیه و جمیع المسلمین

KITAB MAULID ULAMA BETAWI

Kitab Maulid ditulis pertama kali pada awal abad 7 Hijriyah tepatnya pada tahun 607 Hijriyah. Ditulis oleh ahli hadis Ibnu Dihyah Al-Kalabi Al-Andalusi dalam karyanya *At-Tawir fi Mawliidi Sirajil Munir* di wilayah Irbil (Irak) yang pada saat itu dipimpin Sultan Muzaffar Abu Said. Sultan lantas menganugerahi 1000 dinar kepada Al-Hafiz Ibnu Dihyah. (Lihat *Kanzun Najah was Surur* halaman 45).

Kitab maulid memang berbeda dengan kitab sirah atau tarikh yang cenderung ilmiah. Pada kitab maulid cenderung pada pendekatan sastra. Karya itu ditulis gabungan antara prosa dan syair. Dilagukan dan dilantunkan kadang dengan iringan rebana.

Selanjutnya karya maulid terus ditulis, Sayid Ja'far Al-Barzanji, Syaikh ad-Dibai, Al-Azabi, maulid Syaraful Anam, Maulid Basyirin Nazdir karya Sayid Ahmad Dardir (Syaih Ibrahim Al-Bajuri memberi catatan (khasyiah) untuk karya ini pada tahun 1326 H), hingga Habib Ali Al-Habsyi melalui Simtut Durar yang sangat terkenal itu dan Habib Umar bin Hafid dalam kayanya *Al-Dliyaul Lami'*. Namun sebenarnya ada kitab maulid yang ditulis oleh ulama Betawi, yaitu Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam karya yang diberi judul *Al-Zuhrul Basim fi Athwari Abil Qasim SAW* (Bunga Berseri dalam mengisahkan Perjalanan Abul Qasim/Nabi Muhammad SAW).

Kitab ini tidak tebal, hanya 62 halaman dan ditulis dalam

huruf Arab Melayu. "Ini kitab menyatakan perihal junjungan kita Sayyidina wa Mawlana Muhammad SAW dengan sebutan mauludnya dan mi'rajnya dan segala kelakuan dan perkataan dan budi bahasanya yang sekalian itu elok dan harum hingga dirupakan dengan bunga *rose*," antar penerbitnya (MA Jaya) dalam *cover*.

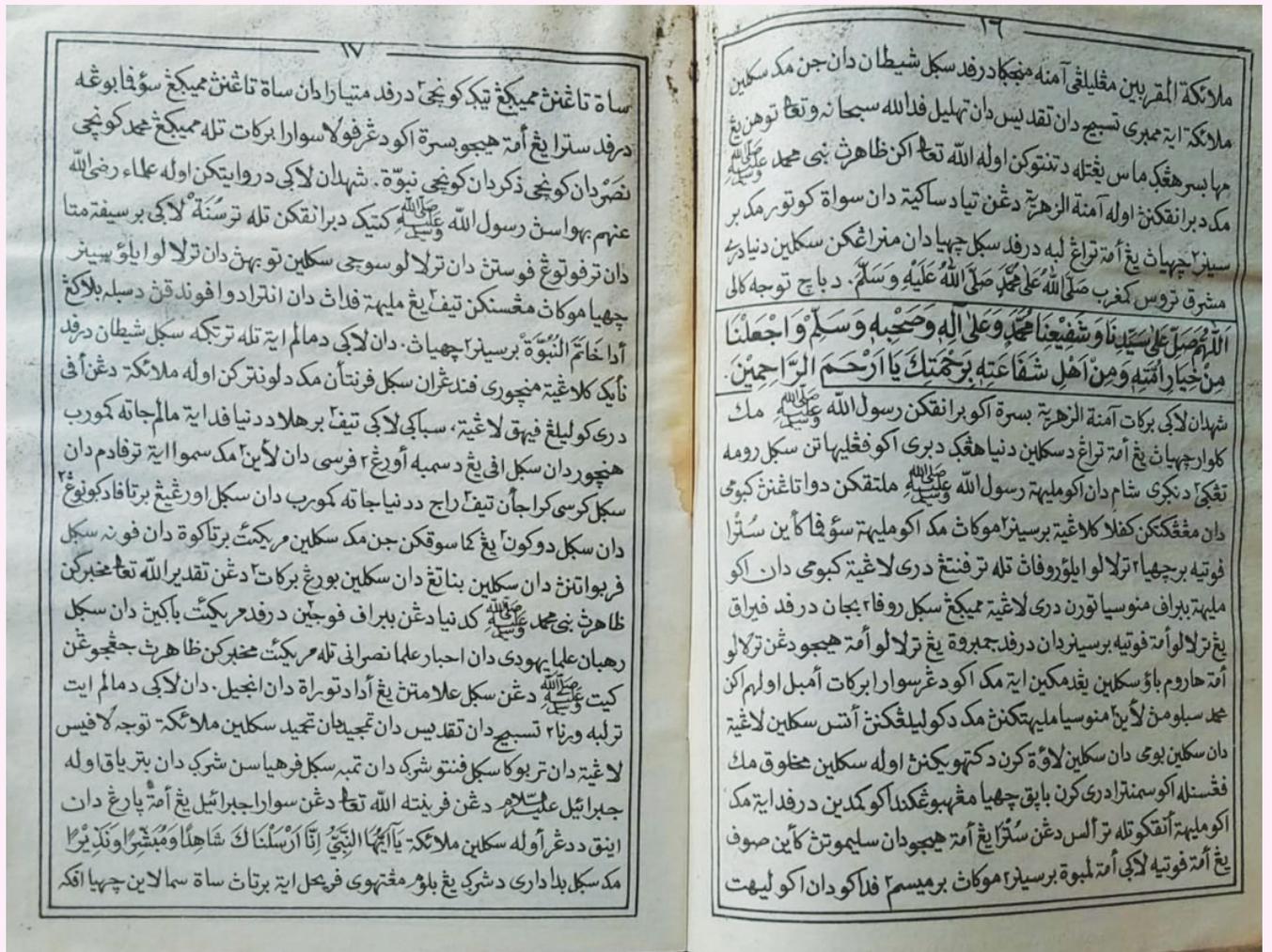
Kitab maulid ini sedikit berbeda dengan kitab maulid yang berbahasa Arab karena tidak diantar selawat.

Bacaan populer pengantar maulid adalah *ya rabi shalli 'ala muhammad ya rabbi shalli 'alayhi wasallim*, dengan berbagai versi baik



Sayid Usman bin Abdullah (1822-1913)

doc.ISTW



doc.ISTW

Diba', Barzanji, Sumtud Durar dan Dliyaul Lami'. Di tengah bacaan biasanya ada syair jeda dan saat kisah masuk kelahiran Nabi Muhammad, maka semua berdiri dan dibacakan ya nabi salam alaika dan seterusnya. Hal ini disebut *serakalan tau mahallul qiyam* dengan berbagai versi syair yang ada. Hal ini memang sengaja dikakukan Sayid Usman agar karyanya ini bisa mengadopsi selawat-selawat dalam karya maulid yang lain karena karya ini semua ditulis dalam bahasa Indonesia (Melayu).

Biasanya pengantarnya diambil dari Ad-Dibai. Di sela-sela kemudian juga mengambil syair dari Ad-Dibai; *ya Rasullallah salamun 'alaka ya rafias sya'ni waddaraji*. Dan seterusnya.

Pada pembatas bab selalu ada bacaan selawat. Jika dalam Syaraful Anam membaca *Allahumma shalli wasallim wa barik alaih*, atau dalam barzanji dibaca *allahumma rawwih ruhahu wa dlarihahu bi'arfin syadiyyin min shalatin wa rudwan dan aththiriallahumma qabrahul karim biarfin syadiyyin min shalatin wataslim*. Namun, dalam karya Sayid Usman dibaca: *Allahuma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi washahbihi wasalim waj'alna min khiyari ummatihi wamin ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin*. Karena ada 15 bab, maka selawat jeda itu akan dibaca 15 kali secara bersama-sama.

Dalam pengantarnya, Sayid Usman mengajari kita bagaimana caranya membaca maulid,



doc.ISTW

khususnya maulid ini. Pertama kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling mulia yang diutus untuk manusia dan jin. Dalam sejarah Rasulullah ada yang wajib diketahui oleh umatnya ada yang sunnah diketahui.

Karena itu, ketika kita membaca maulid harus di tempat yang baik dan layak, seperti masjid atau surau atau tempat terhormat lainnya. Tidak boleh duduk di kursi dan ada meja. Menurut Sayid Usman, maju dan kursi bukan dari aturan Islam.

Kemudian, tidak boleh dalam ruangan itu ada gambar atau foto manusia atau binatang, karena hal itu tidak disukai Rasulullah. Tidak boleh laki-laki dan perempuan membaur, kecuali ada pemisah. Tidak boleh ada alat-alat yang diharamkan.

Pembacaan maulid jangan di tempat yang bau busuk yang dibenci malakat. Sayid Usman menyontohkan dengan bau rokok dan cerutu, atau dekat dengan kandang binatang. Karena itu sering kali dalam pembacaan maulid dibakar-kandungan dupa stangghih dan dibagikan minyak wangi.

Mereka yang hadir harus menyimak kisah perjalanan hidup Rasulullah itu dengan seksa-

ma, tidak saling bercakap sendiri, dan lain sebagainya. Jika kisah sudah memasuki kisah kelahiran Rasulullah, menurut Sayid Usman yang hadir sunnah berdiri dengan penuh hormat.

Kedua, kitab maulid itu berkisah tentang kelahiran dan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diakui oleh pengarangnya ini, karena kitab-kitab maulid itu ditulis dalam bahasa Arab, maka jarang yang paham. Karena itu ia menyuliskannya dalam bahas Melayu. Ia sengaja banyak mengutip dari Maulid Syaraful Anam dan Maulid Al-Barzani dan menambahkan dari kitab-kitab lainnya.

Ketiga, kitab maulid dan Israk Mi'raj ini bisa dibaca kapan saja tanpa terikat waktu. Tapi yang lebih ditekankan keutamaannya dibaca pada tanggal kelahiran Rasulullah, yaitu 12 Rabiul Awwal dan tanggal Isra Mikraj yaitu 27 Rajab. Dan cara keempat pada setiap fasal dianjurkan untuk membaca selawat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kitab maulid ini masih dibaca oleh sebagian masyarakat Betawi dan lainnya, terutama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad atau acara-acara lainnya yang memerlukan berkah dan syafaat Rasulullah. ■ (Musthafa Helmy)



mediaindonesia.com

9 Resolusi Jihad Ekonomi Hasil Kongres Ekonomi Umat II MUI

Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup dengan melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat. Dalam resolusi tersebut, lahir sembilan gagasan yaitu gerakan produksi dan belanja produk nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan optimalisasi Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat.

“Selain itu, KEU II menyepakati membentuk

lembaga penjamin nasional syariah untuk usaha ultra mikro yang mudah, murah dan aman. KEU II menyepakati mempercepat terciptanya modal bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat kemitraan antara UMKM dengan BUMN/ BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/daerah,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambu-

nan, saat penutupan KEU II di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (12/12).

Dia menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Buya Amirsyah menambahkan, hasil kongres Ekonomi Umat ini melalui perdebatan yang dinamis. Ia merasa bersyukur karena jihad ekonomi lahir dari kongres ini. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

“Tentu harus melalui proses baik dalam bidang pembiayaan, perbankan, dan lain-lain, terutama melalui keuangan syariah yang harus terlibat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menerangkan, hasil Kongres Ekonomi Umat II berupa resolusi jihad ekonomi bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjadi pelaku ekonomi.

“Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi,” ujar Lukman.

Saat membuka Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia tahun 2021, Presiden Joko Widodo bersyukur kondisi ekonomi syariah Indonesia di kancah internasional di periode 2020-2021 sudah menempati urutan keempat di dunia. Peningkatan itu mengindikasikan pengelolaan ekonomi syariah di Indonesia terus menggalat.

Jokowi mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 posisi ekonomi syariah Indonesia masih diurutan kesembilan. Orang nomor satu di Indonesia ini yakin, kedepan pertumbuhan ekonomi syariah akan mengalami peningkatan signifikan.

Ia menargetkan pada tahun 2024 mendatang, ekonomi syariah Indonesia ada di posisi puncak. Dengan kata lain, Jokowi ingin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“InsyaAllah dua tiga empat tahun ini akan masuk kedua atau satu. Kalau pertumbu-

hannya seperti yang kita lihat sekarang kan cepat sekali,” demikian kata Jokowi di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jalan Gatot Siebroto, Jakarta Pusat, Jumat sore (10/12).

Jokowi kemudian menyampaikan argumentasi mengapa Indonesia akan mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kata dia, pasar ekonomi syariah Indonesia sudah mulai ekspansi ke semua negara.

Ia berharap, dengan jumlah total penduduk muslim dunia yang mencapai 87 persen atau 207 juta jiwa, Indonesia akan berhasil merealisasikan target

9 Poin Resolusi Jihad Ekonomi

1. Gerakan produksi dan belanja nasional.
2. Mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
3. Mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat.
4. Menghadirkan lembaga penjaminan nasional Syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.
5. Mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional.
6. Memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar.
7. Mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/ daerah.
8. Mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi serta integrasi dana komersial dan dana sosial Islam.
9. Mengamanatkan kepada komisi pemberdayaan ekonomi umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

tersebut.

“Kita telah berkomitmen telah menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Kita akan berusaha keras untuk itu,” demikian penegasan Jokowi.

Saat menutup jalannya KEU II MUI secara resmi, Wapres RI, KH Ma'ruf Amin,

mengapresiasi hasil kongres berupa Jihad Ekonomi Umat.

“Saya mengapresiasi jihad ekonomi yang dilakukan MUI salah satunya melalui penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat II ini,” ujarnya saat menutup KEU II.

Kongres Ekonomi Umat II yang digelar pada 10-12 de-

seMBER 2021 ini mengusung tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia. Menurut Kiai Maruf, tema yang diusung sangat penting dibahas untuk menemukan langkah strategis ekonomi Indonesia di masa depan.

Apalagi, kata kiai Maruf, Presiden Jokowi telah mene-

Tindakan Afirmatif Pemerintah Kunci Pengembangan Ekonomi



Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Annas, berbagi kisah sukses mengembangkan ekonomi di level kabupaten yang dipimpinnya selama dua periode mulai tahun 2010 sampai 2020. Menurutnya, kunci dari pengembangan ekonomi di level kabupaten adalah adanya *affirmative action* dari pemerintah kabupaten.

“Beberapa kebijakan dan langkah afirmatif yang kita buat sesuai dengan Deklarasi Aksi

Ekonomi Nomor 457. Teori kita banyak tetapi afirmasi kebijakan banyak tidak terukur. Kebijakan afirmatif yang terukur itulah yang dapat dikerjakan pemimpin lokal,” ujar pria yang digadang-gadang menjadi Ketua Badan Otorita Ibu Kota Baru ini, Jumat (10/12) di Hotel Sultan, Jakarta dalam Kongres Ekonomi Umat II.

Dia mencontohkan, beberapa langkah afirmasi yang dilakukannya adalah melarang berdirinya Alfamart dan Indomaret selama sepuluh tahun. Dia menilai, berdasarkan survei yang dia terima, kehadiran satu alfamart dan Indomaret akan mematikan tiga puluh warung di kanan kirinya.

“Salah satu langkah afirmasi kami adalah melarang pasar modern dan mall berjejar ada di Banyuwangi. Pasar modern dan mall buka sampai 24 jam bahkan dengan modal

tapkan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, lanjutnya, berbicara arus baru ekonomi Indonesia harus mengalir hingga tiba di tujuan tersebut.

“Dalam arus baru ekonomi kita harus menekankan tentang beberapa unsur yaitu penguatakan ekonomi dan

keuangan syariah, bagian dari integral ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pembangunan ekonomi yang harmonis dengan lingkungan,” tuturnya.

Kiai Ma’ruf mendoakan agar hasil kongres ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat, dan

ekonomi Indonesia secara luas.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan inayahnya dan meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan,” pungkas Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu. ■ (Saddam Al Ghifari/Azharun Niam/Muhammad Fakhruddin)

yang cukup, maka yang terjadi adalah warung-warung atau pasar tradisional akan gulung tikar,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, selama ini mall seolah menjadi simbol kemajuan daerah secara kasat mata. Padahal, ujar dia, kehadiran mall tersebut seringkali tidak memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada daerah bersangkutan.

Dengan status Banyuwangi sebagai salah satu ikon pariwisata yang mulai bergeliat, Anas menyampaikan, ada pelarangan pembangunan hotel bintang tiga ke bawah dibangun di Banyuwangi. Dengan begitu, maka pasar hotel bintang tiga ke bawah diisi oleh masyarakat Banyuwangi yang menyediakan *homestay* murah.

“*Homestay* kami tumbuh lebih dari 600 di Banyuwangi. Selama ini kami melihat dalam pembangunan pariwisata, rakyat lebih banyak menjadi penonton dan investor kerap menjadi raja di tempat wisata,” ujarnya.

Kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintah seperti itulah yang menurut Anas perlu



ditiru kepala daerah yang lainnya. Dia menilai, yang lebih penting dari pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan ekonomi. Karena itu, pemerataan ekonomi Indonesia bisa dimulai dengan mengembangkan ekonomi pada setiap daerah utamanya di level kabupaten/kota.

“Sekarang tinggal bagaimana MUI mendorong teman-teman di daerah mengeluarkan keputusan di tingkat lokal yang memberikan afirmasi agar ekonomi umat kita bisa bertahan dan tumbuh dengan baik,” ujar suami Bupati Banyuwangi periode 2020-2025 ini. ■ (Abi Rachman/Azharun Niam)



Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) saat memaparkan materi di acara Kongres Ekonomi Umat II MUI

Pesantren sebagai Mercusuar Peradaban

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan tiga strategi untuk menyeimbangkan dan mengejar ketertinggalan ekonomi umat.

Dia menjelaskan, ketiga strategi tersebut yaitu Muslim berkarya, melibatkan pesantren sebagai mercusuar peradaban, dan membangun infrastruktur untuk UMKM.

Dia mengingatkan, umat Muslim harus bisa ber-

daya saing dalam berkarya. Menurutnya, selama ini umat Islam masih kalah di bidang ekonomi. "Muslim berkarya, yang selama ini mohon maaf kalah,"katanya, dalam Rapat Pleno Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (11/12).

Erick lanjutkan, mengenai strategi yang melibatkan pesantren yang akan dijadikan sebagai mercusuar peradaban. Dia menceritakan, saat beberapa kali turun ke pondok pe-

santren bersama Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, dia melihat pesantren Al-ittifaq, Ciwidey Bandung, yang mandiri secara ekonomi.

Di pesantren tersebut, dia melihat bahwa pesantren Al-Ittifaq membangun pertanian agroponik yang melibatkan penduduk sekitar. "Saya beberapa kali bersama pak Sekjen, melihat salah satunya di Ciwedey, Ponpes Al-Ittifaq, pesantren tersebut membangun pertanian, berdasarkan agroponik melibatkan pen-



Konsep ketahanan pangan ala pondok pesantren Al-Ittifaq

duduk sekitarnya dan *alhamdulillah* yang diproduksi dan dijual ke market, ke pasaran itu selalu kurang,” tambahnya.

Erick menambahkan, pesantren tersebut sampai bekerjasama dengan pesantren lainnya di Jawa Barat bahkan sampai di Lampung. Menurutnya, inilah alasan mengapa pihaknya terus mendorong terwujudnya ekosistem ini. “Nah inilah contoh kita harus kembalikan pesantren ini tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pembangunan akhlak, tetapi bagaimana pesantren bisa hidup bersama,” jelasnya.

Kemudian, dia menjelaskan mengenai strategi ketiga untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, BUMN harus berpihak dan mengintervensi UMKM dengan cara membangun infrastruktur. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa financial Syariah juga

harus dikembangkan.

“BUMN harus berpihak, harus bisa mengintervensi, seperti yang telah disampaikan, kita membangun dan berpihak kepada UMKM. Ini ekonomi umat salah satunya, financial Syariah menjadi salah satu pilihan yang harus dikembangkan,” kata dia.

Kepala Badan Ekonomi Syariah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorosiko mengatakan perlu sinergi dan kolaborasi yang intensif antara seluruh *stakeholder* untuk membangkitkan ekonomi umat.

“Kami mewakili Badan Ekonomi Syariah Kadin, sangat mendukung kongres Ekonomi Ulama yang kedua ini. Kami juga mengajak seluruh *stakeholder* untuk bersinergi membangkitkan ekonomi umat di Indonesia,” katanya mewakili ketua Umum Kadin, Arsjad Ras-

jid, saat diwawancarai, Ahad (12/12).

Menurutnya, Kongres Ekonomi Umat II yang diselenggarakan oleh MUI pada 10-12 Desember 2021, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat memiliki visi dan misi yang sama dengan program Badan Syariah Kadin.

Karenanya perlu sinergi dan kolaborasi yang intensif antara seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 produsen halal di dunia.

Lebih lanjut, kata Taufan, dengan terwujudnya Indonesia sebagai produsen halal dunia, maka ekonomi umat diharapkan bangkit akan tercapai.

Ia mengaku menyambut positif dengan digelarnya Kongres Ekonomi Umat kedua MUI ini. Sebab, sebagai organisasi wadah pengusaha, Kadin memiliki fungsi mengayomi bisnis dari tingkat mikro hingga nasional.

“Dikarenakan Kadin membawahi serta mengayomi bisnis-bisnis ekonomi dari tingkat usaha mikro, menengah, swasta dan BUMN. Melalui program-program tersebut diharapkan bisa terus memberikan sumbangsih pada ekonomi umat,” jelasnya. ■ (Saddam Al-Ghifari/Nashih Nasrullah/Muhammad Fakhruddin)

Sekolah Hak Asasi Manusia MUI



International Webinar “on Human Rights in Various Perspectives (Islam, UDHR, and Indonesia) and the Launching of the MUI Human Rights School”

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus penandatanganan MoU dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu (15/12).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI, Prof KH Noor Achmad pada sambutannya di International Webinar “on Human Rights in Various Perspectives (Islam, UDHR, and Indonesia) and the Launching of the MUI Human Rights School”.

“Acara ini menjadi momentum yang sangat penting,

karena pemikiran mengenai HAM yang terus berkembang sejalan dengan hukum itu sendiri,” tuturnya Prof. Noor.

Di samping itu, menurutnya harus diakui bersama bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan. Kata Prof Noor, hak tersebut mencakup banyak aspek, baik itu yang terkait dengan hak hidup, beragama, berpendapat, dan lain sebagainya.

Dengan adanya HAM yang melekat pada setiap individu tersebut, muncul permasalahan lain dalam kehidupan yang perlu dicarikan solusi

bersama untuk meresponnya.

Ketua Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) ini kemudian mencontohkan, solusi terkait dengan hak bagaimana



mencari jodoh, perkawinan, perceraian, kebebasan berganti kelamin, dan hak pekerjaan.

MUI telah mengeluarkan mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2000 mengenai HAM. Tujuannya, untuk merespons berbagai permasalahan yang ada. Sebab, Prof Noor mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh MUI bersama *stakeholder* lain menjadi penting untuk perkembangan HAM di Indonesia.

“Upaya sama juga telah dilakukan oleh DPR RI yang tengah mematangkan ren-

cana undang-undang terkait kehidupan umat di Indonesia dalam hal ini mengenai HAM,” katanya.

“Akhir-akhir ini terjadi pertentangan antara pihak satu dengan yang lain, bahkan mengklaim dengan mengatasnamakan agama dan kelompok masyarakat. Di sinilah MUI akan hadir sebagai pengayom masyarakat yang dituntut untuk memberikan solusi permasalahan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Noor menegaskan, hadirnya MUI sebagai pengayom masyarakat

tetap berpegang teguh pada prinsip agama serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, melalui sekolah HAM MUI merupakan upaya untuk terus mengawal perkembangan HAM di Indonesia serta sebagai celah untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan umat. ■

(Isyatami Aulia/Angga Ulung Tranggana)





Kembali Raih Sertifikat ISO, MUI Ingin Jadi Organisasi Modern

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menerima Sertifikat ISO 9001: 2015. Sertifikat ini menunjukkan komitmen MUI untuk menjadi organisasi yang profesional dan akuntabel.

Penyerahan Sertifikat ISO 9001: 2015 dilakukan secara simbolik kepada Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar oleh Komisaris WQA

Regional Asia Pasifik, Iskandar Zulkarnain, Selasa (7/12). Turut menyaksikan penyerahan sejumlah tokoh antara lain Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, sejumlah duta besar negara sahabat, dan segenap dewan pimpinan harian MUI.

Ketua MUI Bidang Organisasi, Prof KH Noor Achmad, mengatakan untuk kali kedua

MUI berhasil meraih sertifikat ISO. Sertifikat yang sama berhasil didapatkan sejak 2017 lalu.

Menurut Kiai Noor, sertifikat ini menunjukkan bahwa MUI adalah salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai kinerja, tata kerja, sistem organisasi, yang tidak hanya dinilai nasional tetapi juga mendapat pengakuan lembaga internasional.



Dia menunjukkan, upaya ini dirintis secara sungguh-sungguh salah satunya oleh Buya Anwar Abbas dan sejumlah tokoh di Baznas seperti Prof Bambang Sudibyo.

Dengan demikian, kata dia, dirinya berharap Baznas dan MUI, jadi organisasi keagamaan yang terbaik di Indonesia, khususnya kinerja pelaksanaan organisasi, sehingga kepercayaan kepada lembaga keagamaan meningkat. "Itu terus kita lakukan bersama," kata dia. Kiai Noor meyakinkan, sekarang ini, di lingkungan MUI, tidak hanya pengurusnya, tetapi semua karyawan pegawai, adalah orang yang punya profesionalitas dan bisa diper-

caya.

Dia berpandangan maka dari itu, keyakinan yang akan datang, MUI terus mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. "Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada WQA yang telah beri kepercayaan kepada MUI, kerjasama ini, berharap terus berlanjut. Dan insya Allah MUI terus pertahankan kepercayaan ini," ujar dia.

Sementara itu, Komisaris WQA Regional Asia Pasifik, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan selamat kepada MUI atas keberhasilannya mempertahankan *maintenance* ISO. Sertifikat ini merupakan penghargaan dan bentuk pengakuan lembaga sertifikasi in-

ternasional.

Menurut dia, MUI terapkan sistem manajemen mutu, sertifikat ini menunjukkan komitmen MUI dan semua pengurusnya menjalankan persyaratan dari sertifikat ISO 9001: 2015.

Dia berharap dengan melalui sertifikat ini akan meningkatkan pelayanan MUI terhadap umat dan mitra kerja, meningkatkan produktivitas dan budaya kerja MUI, meningkatkan kinerja selama pandemi sekaligus wujudkan MUI menjadi organisasi modern, profesional, akuntabel, dan transparan.

Dia menyatakan tak mudah menjalankan manajemen mutu, membutuhkan pengor-

banan kerja keras tim dan tim terkait termasuk komisi dan lembaga di MUI.

Dia berpesan, pencapaian ini bukan tujuan akhir, melainkan langkah keberlanjutan MUI untuk proses perbaikan berkesinambungan, dengan pencapaian ini.

“Diharapkan semangat motivasi dan menularkannya kepada seluruh MUI provinsi dan ormas Islam melakukan perbaikan jadi organisasi modern, bersih, dan profesional,” tutur dia.

Dalam pengarahannya, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan MUI ingin menjadi organisasi modern. Salah satu ciri modern tersebut adalah dalam bertindak bersifat efisien dan efektif.

Keputusan di atas, menurut Buya Anwar dikarenakan MUI telah melakukan upaya optimal dalam bertindak secara efisien dan efektif sebagai khadimul umah dan shadiqul hukumah atau pelayan umat dan mitra pemerintah.

Buya Anwar menjelaskan, modernisasi organisasi sesuai standar ISO, merupakan upaya MUI bertahan di tengah gelombang dan perubahan zaman. Dengan demikian, MUI akan mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada.

Atas dasar itu, Buya An-



war berharap, MUI bisa menjadi organisasi modern, profesional, dan transparan. Dengan demikian, MUI secara berkesinambungan terus memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan kapasitas, dan kinerja.

Upaya pembangunan organisasi MUI itu, ditekankan Buya Anwar, harus sesuai dengan prinsip *al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah*, atau upaya perbaikan ke arah yang lebih baik lagi dan seterusnya.

Buya Anwar mengatakan, MUI akan tetap terbuka menerima kritik. Ia memastikan, setiap kritik yang dilayangkan ke MUI akan menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi yang menaungi ulama dari

berbagai latar belakang itu.

“Karena pada dasarnya tujuan sertifikasi ISO yaitu mampu mewujudkan pelayanan prima hingga memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari *stakeholder*,” katanya.

Buya Anwar berharap, melalui instrumen tersebut dapat mewujudkan MUI sebagai organisasi yang maju dan berstandar internasional.

Buya Anwar juga menjelaskan, terpenuhinya persyaratan berstandar internasional diharapkan menambah motivasi, semangat, dan komitmen dari seluruh jajaran pengurus MUI untuk lebih giat dan produktif dalam menjalankan amanah. ■

(Isyatami Aulia/Angga Ulung Trangana)



mui.or.id

MUI dan Tokoh Agama Sepakat Bentuk Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulsel

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel dan Majelis Agama Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sepakat membentuk Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulsel.

Kesepakatan tersebut diambil dalam acara “Silaturahmi Majelis Agama Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan” yang diadakan MUI Sulsel, di Sultan Alauddin Hotel & Conventions (Hotel UIN), Jl. Sultan Alauddin, Makassar, Sabtu

pagi (11/12/2021).

Usulan pembentukan Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulsel tersebut dilontarkan Ketua Permabudi Sulsel Dr Ir Yonggris MM, dan disetujui peserta silaturahmi, yakni Ketua MUI Sulsel Prof Najmuddin, Ketua Walubi Sulsel Henry Sumitomo, Ketua Matakin Sulsel dr Ferdy M Sutono, Ketua PGIW Sulsel Pdt Adrie Masiee, wakil dari Uskup Agung Sulsel dan wakil dari PHDI Sulsel.

Juga hadir Sekum MUI Sul-

sel Dr Muammar Bakry, Ketua Bidang Antar Umat Beragama MUI Sulsel Dr Majdah M Zain, Ketua Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Sulsel Prof Wahyuddin Naro, serta sejumlah undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Walubi Sulsel Henry Sumitomo, secara spontan menyumbang uang sebesar Rp50 juta untuk korban banjir (dua buah rumah terbawa arus banjir bandang di Soppeng beberapa hari lalu. ■ (Asnawin/muisulsel.com)

MUI Ajak Masyarakat Gala Korban Erupsi Semeru

JAKARTA – Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami Erupsi, Sabtu sore (4/12). Luapan abu vulkanik ini terjadi sekitar pukul 15.20 WIB

Menanggapi musibah meletusnya gunung Semeru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan mengajak segenap anak bangsa memperkuat solidaritas dan soliditas untuk menggalang bantuan.

“Segenap anak bangsa harus terus memperkuat solidaritas dan soliditas untuk menggalang bantuan bagi saudara kita yang terdampak korban gempa di Gunung Semeru,”ujarnya kepada MUI-Digital, Ahad siang (5/12).

Buya Amirsyah menuturkan, musibah yang terjadi harus disikapi dengan sabar dan penuh hikmah karena setiap musibah ada hikmahnya.

“Karena setiap musibah ada hikmahnya di antaranya para ilmuwan harus mampu

menangkap pesan Allah dalam setiap peristiwa,” tambahnya.

Sekjen MUI juga mengingatkan umat dalam QS Asy-Syaura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya:

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).”

Ia pun mengingatkan Umat untuk terus berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah agar musibah ini segera berakhir.

Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui siaran pers yang diterima MUIDigital, Ahad (5/12).

Hingga pukul 09.20 WIB, kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyono melaporkan, sebanyak 13 warga meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Sejauh ini baru dua korban yang berhasil diidentifikasi.

Selain itu, sebanyak 41 orang yang mengalami luka-luka, khususnya luka bakar, telah mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Penanggal. Untuk warga yang mengalami luka bakar parah di rujuk ke RS Haryoto, Lumajang.

Sementara itu, warga luka lainnya ditangani pada beberapa fasilitas kesehatan, yaitu 40 orang dirawat di Puskesmas Pasiran, 7 orang di Puskesmas Candipuro, serta 10 orang lain di Puskesmas Penanggal yang terdapat dua orang ibu hamil.

Tim BPBD Kabupaten Lumajang dan tim gabungan

ng Bantuan untuk



Permukiman warga rusak parah akibat letusan gunung Semeru

pikiran-rakyat.com



Korban terdampak erupsi gunung Semeru

jprn.com

hingga saat ini terus melakukan proses pencarian dan evakuasi warga yang terdampak.

BPBD Kabupaten Lumajang juga melaporkan terdapat 902 warga yang mengungsi di beberapa titik kecamatan. Sebanyak 305 orang mengungsi di beberapa fasilitas pendidikan dan balai desa di kecamatan Pronojiwo.

Sebanyak 409 orang di lima titik balai desa di kecamatan Candipuro, dan 188 orang mengungsi di empat titik yang terdiri dari rumah ibadah dan balai desa di Kecamatan Pasiran.

Sebaran awan panas guguran Gunung Semeru ini juga menyebabkan beberapa rumah warga tertutup material vulkanik serta jembatan

Gladak Perak di Curah Kobokan yang menjadi akses penghubung Lumajang dan Malang terputus.

Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), saat ini Gunung Semeru masih dalam status level II atau 'waspada'. ■

(Sadam Al-Ghifari/Angga Ulung Tranggana)

foto:Liputan6.com

SIAP-SIAP KETIBAN CUAN

my IndiHome

Link
Aja!

CASHBACK
Rp **100
RIBU***

Kejutan
Spesial
Setiap
Bulan!

Merchandise
Eksklusif

Disney+
hotstar

EKSTRA
53
CHANNEL TV

Merchandise
Eksklusif dari
IndiHome

*Bonus
langsung
untuk 1000
pelanggan
pertama

Info lebih lanjut
scan QR code berikut



Langganan layanan IndiHome melalui: myih.ch/siapcuan

SELALU ADA KEJUTAN SPESIAL SETIAP BULAN

Yuk, buruan ikutan!



Info lebih lanjut
Scan QR Code



Untuk tau kejutan bulan ini, kunjungi:

indihome.co.id | my **IndiHome**  